

## ANALISIS PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN MADRASAH MENJADI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM UNGGUL DI MASA NEO MODERN

Faradhillah Amir<sup>1</sup>, Ahmad Suja'i<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani<sup>1,2</sup>

faradhillah.amir27@gmail.com<sup>1</sup>, sujaicilegon@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Fokus masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang menjadikan madrasah mengalami problem dan tantangan untuk menjadi Lembaga pendidikan Islam yang unggul. Idealnya, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang kental dengan nilai-nilai agama dapat bersaing dengan lembaga lain yang sudah maju. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif, di mana sumber data diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) berupa buku, jurnal, dan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa berbagai problem dan tantangan yang kerap dihadapi madrasah diantaranya adalah manajemen sekolah, kualitas sumber daya tenaga pendidik, evaluasi pendidikan yang bersifat parsial, hasil belajar yang rendah, minimnya sarana dan prasarana, dan lingkungan sekolah yang tidak mendukung. Solusi yang dapat ditawarkan adalah memperbaiki manajemen yang meliputi manajemen perencanaan, sumber daya manusia, kurikulum, kesiswaan, administrasi, dan keuangan.

Kata Kunci: *Lembaga Pendidikan Islam, Madrasah, Problematika, Tantangan, Unggul*

**Abstract:** The focus of the problems studied in this paper is related to things that make madrasah experience problems and challenges to become superior Islamic educational institutions. Ideally, madrasah as an Islamic educational institution that is thick with religious values can compete with other institutions that have advanced. The writing method used by the author is qualitative, where data sources are obtained through library research in the form of books, journals, and others. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the discussion showed that various problems and challenges that are often faced by madrasah include school management, the quality of educator resources, partial educational evaluation, low learning outcomes, lack of facilities and infrastructure, and an unsupportive school environment. The solution that can be offered is to improve management which includes planning, human resources, curriculum, student, administrative, and financial management.

Keywords: *Islamic Education Institution, Madrasah, Problems, Challenges, Superior*

### PENDAHULUAN

Dalam sebuah diskusi, penulis sempat menerima pendapat dari masyarakat terkait dengan pendidikan Islam. Menurut sebagian masyarakat, mereka lebih suka untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah umum ketimbang sekolah agama (Islam). Alasannya sederhana, sekolah umum lebih menjamin masa depan anak mereka ketimbang sekolah Agama. Hal ini karena realita yang mereka amati, bahwa alumnus sekolah-sekolah umum dapat mengantarkan anak-anak mereka menjadi dokter, insinyur, polisi, atau paling sederhana, alumni sekolah umum lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sekolah agama hanya akan mengajarkan anak-anak mereka menjadi guru ngaji, menjadi imam masjid, memimpin tahlilan, atau membaca doa di pekuburan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Diskusi dengan jama'ah Majelis Ta'lim asy-Syamsi Kunciran Mas Permai, Juni 2022.

Fenomena tersebut nampaknya telah menjadi konstruk berfikir sebagian masyarakat Indonesia, bahwa pendidikan, apabila diberi embel-embel Islam, akan dianggap berkonotasi kemunduran dan keterbelakangan. Jadi, jika diamati dan disimpulkan, pendidikan Islam, "seolah-olah" terkungkung dalam kemunduran, kekalahan, keterbelakangan, ketidakberdayaan, perpecahan, dan kemiskinan, sebagaimana pula yang dialami oleh sebagian besar negara dan masyarakat Islam dibanding negara yang sebagian besar non-Islam (misalnya Eropa). Pandangan ini tentu sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan Islam, yang pada akhirnya dipandang selalu berada pada posisi deretan kedua dalam konstelasi sistem pendidikan di Indonesia.

Madrasah yang merupakan lembaga pendidikan yang bercirikan Islam. Dilihat dari sudut organisasinya madrasah merupakan organisasi yang mengelola diri sendiri dilingkungan departemen agama dan dilihat dari sudut sistem pendidikan nasional madrasah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Agar kualitas madrasah dapat setingkat dengan sekolah dilingkungan departemen pendidikan nasional maka madrasah harus mampu membuat terobosan yang harus dilakukan seiring perubahan yang dilakukan oleh departemen pendidikan nasional. Madrasah sesungguhnya merupakan lembaga pendidikan Islam yang berakar dari tradisi Islam sendiri sehingga tidak mungkin ditangani secara sekuler, tetapi pemerintah juga memahami. Tetapi pemerintah juga memahami bahwa umat Islam menuntut hak dan status yang lebih baik bagi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sehingga kedudukan dan orientasinya sama dengan sekolah.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam walaupun mempunyai tujuan khusus akan tetapi pendidikan yang dilaksanakannya harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dalam artian bahwa pendidikan pada madrasah harus dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan pendidikan nasional.<sup>2</sup> Menurut Azyumardi Azra madrasah adalah sebagai sekolah umum plus. Karena pada prinsipnya tidak ada pertanyaan tertulis apakah eksistensi sekolah umum dengan madrasah atau pesantren. Oleh karena itu perbedaan antara sekolah umum dengan madrasah, yang pada prinsipnya madrasah adalah sekolah umum, yang eksistensinya madrasah adalah sekolah umum plus. Madrasah harus 100% mengikuti kurikulum yang ada pada tingkat SD-SMP-SMA untuk madrasah yang sejajar kemudian ditambah dengan pengajaran umum, pengajaran agama.<sup>3</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya madrasah dengan sekolah umum itu sama akan tetapi juga ada perbedaannya. Persamaannya adalah kurikulum mata pelajaran umum yang ada di madrasah 100% sama dengan kurikulum yang ada pada tingkat SD-SMP-SMA. Perbedaannya, madrasah memiliki nilai plus dibandingkan sekolah umum, yaitu madrasah memiliki kurikulum dari Kemenag untuk materi pelajaran agama yang diaplikasikan secara terpisah-pisah atau penuh pada jam pelajaran yang meliputi qur'an hadits, fiqih, aqidah akhlak, SKI, dan bahasa arab. Sedangkan di SD-SMP-SMA untuk materi agamanya sangat sedikit.

---

<sup>2</sup> Mansur Mahfud Junaedi, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005, h. 99

<sup>3</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Rekonstruksi dan Demokratisasi)*, Jakarta: Buku Kompas, 2002, h. 116.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Problematika dan Tantangan Madrasah

Madrasah, seperti halnya lembaga pendidikan yang lain, memiliki berbagai macam persoalan yang harus diperhatikan dengan seksama dan segera dicarikan solusi bagi eksistensi dan juga untuk peningkatan mutu Madrasah itu sendiri. Problematika yang selama ini masih banyak di alami oleh Madrasah antara lain adalah:<sup>4</sup>

a. Evaluasi pendidikan yang bersifat parsial

Minimal ada tiga hal yang perlu memperoleh perhatian bagi peningkatan mutu hasil belajar di Madrasah. *Pertama*, sistem yang dikembangkan sekarang belum komprehensif karena lebih berorientasi kepada pengajaran sekolah umum sehingga belum menyentuh hasil belajar yang menyangkut moral dan nilai keagamaan yang menjadi keunggulan Madrasah. *Kedua*, dalam instrumen standarisasi mutu yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) dan pengendalian yang diwujudkan dalam sistem akreditasi nasional, lebih menitikberatkan kepada pengukuran inputs dalam arti statis dan kurang melihat bagaimana intensitas input itu dipergunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, sementara yang terakhir ini merupakan salah satu keunggulan Madrasah dalam keterbatasan input yang dimiliki. *Ketiga*, penilaian terhadap hasil belajar siswa secara nasional yang diwujudkan dalam bentuk Ujian Akhir Nasional (UAN) masih bersifat parsial, baik dalam artian jumlah mata pelajaran maupun cara hasil belajar itu diukur.

b. Hasil belajar yang rendah

Berdasarkan data kelulusan dan nilai UAN yang tersedia menunjukkan bahwa secara nasional hasil belajar siswa Madrasah lebih rendah dari sekolah umum. Proporsi siswa Madrasah yang tidak lulus ujian akhir 7-10% lebih besar dari proporsi siswa sekolah umum, walaupun rata-rata nasional nilai seluruh mata pelajaran masih di bawah 6 di kedua jenis pendidikan tersebut.

c. Penilaian kualitas berorientasi input

Sistem akreditasi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas Madrasah, namun keberadaannya saat ini masih berorientasi kepada penilaian terhadap input saja. Proses ini yang demikian telah mendorong Madrasah lebih mengutamakan peningkatan inputs dengan kurang memperhatikan penggunaan input sebagai instrumen untuk meningkatkan hasil belajar.

d. Sumber daya manusia

Peran sumber daya manusia yang utama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Madrasah adalah guru dan kepala sekolah, oleh karena itu UU No. 20/2003 sangat memperhatikan mereka tetapi juga mengatur standar yang ketat. Karena sebagian besar madrasah adalah swasta dan kebanyakan berstatus terdaftar dana belum terdaftar maka proporsi guru PNS, yang biasanya sudah memenuhi standar minimal, sangat sedikit. Ini mengakibatkan sebagian besar adalah guru yayasan dan guru BP3 yang bekerja penuh waktu dan sebagian besar lainnya paruh waktu dengan jumlah rata-rata jam per minggunya tidak diketahui dari data yang tersedia. Mereka menjadi beban orang tua atau yayasan yang kemampuan membiayainya rendah

---

<sup>4</sup> Jurnal Pondok Pesantren Al-Manshur Darun Najah 3, *Madrasah, Problematika dan Tantangannya*, Serang-Banten, 2012.

sehingga renumerasi yang diperolehnya sangat rendah. Untungnya rata-rata mereka bekerja dengan dedikasi yang tinggi.

Menurut data statistik banyak guru yang masih dibawah standar kualifikasi walaupun beberapa diantaranya telah berpengalaman lama dan mengikuti berbagai penataran kemampuan, tetapi hasil penataran dan kemampuan ini tidak diukur seberapa jauh meningkatkan kompetensi mengajarnya. Sebagian guru Madrasah juga mengajar tidak sesuai dengan latar belakang bidang studinya. Upaya penataran, studi lanjut, dan studi alih bidang sudah banyak dilakukan tetapi dalam statistik tidak jelas berapa diantaranya yang telah berhasil memenuhi kompetensi mengajar yang sesuai dengan bidangnya.

e. Kepala Madrasah

Dalam sistem manajemen berbasis sekolah diperlukan kepala sekolah yang inovatif, kreatif, dan berkemampuan melakukan pengelolaan sendiri baik dalam aspek pengembangan kurikulum, personalia, pembiayaan dan akuntabilitas. Semua Kepala Madrasah di Madrasah negeri adalah PNS sementara di Madrasah swasta hanya 34%. Proporsi yang memiliki kualifikasi minimal berkisar 19 sampai 31% dan kompetensi manajemennya juga masih rendah.

f. Sarana dan prasarana pendidikan

Empat komponen menjadi sorotan utama dalam studi ini, yaitu: ruang kelas, buku pelajaran, laboratorium, dan perpustakaan, karena mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap hasil belajar siswa.

1) Ruang kelas. Pada umumnya kebutuhan ruang kelas terpenuhi kecuali di MI terdapat kekurangan sekitar 400 ruang kelas di negeri dan 8000 di swasta. Sebagian diatasi dengan cara bergilir pagi siang, sebagian dengan meminjam, dan sebagian menerapkan kelas campuran. Secara keseluruhan ada 56% yang masih layak pakai, sisanya memerlukan perbaikan dan proporsi terbesar adalah di MI swasta.

2) Buku pelajaran. Buku pelajaran pokok yang dimiliki Madrasah berkisar antara 23 sampai 92% dari yang diperlukan di Madrasah negeri dan hanya 3 sampai 8% di Madrasah swasta dari yang diperlukan untuk memenuhi satu buku satu siswa. Penyebabnya bisa karena sebagian sudah rusak, sebagian tidak dikembalikan siswa, pemerintah belum dapat memberikan lengkap, atau kelemahan distribusi. Sementara itu, selain dari pemerintah Madrasah juga membeli buku sendiri untuk pengan guru dari penerbit lain untuk memperkaya materi yang diajarkan.

3) Perpustakaan dan laboratorium. Sekitar 40% Madrasah negeri dan 30% Madrasah swasta memiliki perpustakaan, 50% diantaranya memerlukan perbaikan. Ada sekitar 19% MTs dan MA yang memiliki laboratorium dan hanya 36% yang memerlukan perbaikan. Jumlah laboratorium komputer lebih banyak dari pada laboratorium IPA dan bahasa, menggambarkan kepekaan Madrasah dalam mengadopsi teknologi baru dan merespon kebutuhan pasar akan ketrampilan ini.

g. Sertifikat tanah

Hampir semua tanah tempat Madrasah (swasta) didirikan dan dibangun sarananya semua diperoleh dari waqaf, sayangnya lebih dari 31.000 belum disertifikatkan sehingga rawan sengketa.

#### h. Rendahnya pendapatan

Dari aspek pendapatan, secara nasional Madrasah negeri menerima bantuan dari pemerintah per-siswa 30% kurang dari sekolah umum, ini menggambarkan bahwa pemerintah belum memperlakukan sama antara Madrasah negeri dengan sekolah negeri. Perbedaan lebih lebar antara Madrasah negeri antar propinsi.

Pendapatan Madrasah swasta jauh lebih rendah dari pada Madrasah Negeri dan perbedaan antar daerah bahkan lebih besar. Semakin melebar untuk Madrasah swasta yang salah satu sebabnya karena proporsi guru PNS yang dipekerjakan di Madrasah swasta jauh lebih kecil dan bahkan banyak Madrasah swasta yang tidak menerima bantuan guru PNS sama sekali, sementara di propinsi lain memperoleh 60% guru PNS yang dipekerjakan.

#### i. Pengeluaran yang besar

Pengeluaran terbesar anggaran Madrasah masih didominasi untuk gaji dan honorarium yang mencapai antara 60 sampai 80%. Di Madrasah swasta yang pendapatannya kecil, proporsinya ditekan sampai 50% agar untuk mendukung proses belajar mengajar lebih besar. Namun demikian dalam rupiah masih sangat kecil, yaitu Rp. 5.000,- per siswa per tahun, jumlah yang terlalu kecil untuk meningkatkan kualitas.

Sementara, tantangan yang harus dihadapi oleh Madrasah di era globalisasi ini antara lain, pertama, perubahan orientasi pendidikan masyarakat akibat tuntutan era industrialisasi di tengah-tengah masyarakat. Kedua, munculnya tren baru pendidikan akibat dari dampak lanjutan perubahan orientasi pendidikan masyarakat di atas, yakni tren yang menjadikan pendidikan umum lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pendidikan agama. ketiga, kenyataan bahwa, dewasa ini, kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh Madrasah dinilai masih rendah daripada layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah umum, apalagi negeri.

Dalam sosialisasi kebijakan tentang Pembinaan dan Peningkatan Mutu Madrasah pada Rapat Koordinasi Pengembangan Kurikulum, pada 14-16 November 2007, di Cisarua Bogor, Dirjen Pendidikan Islam menyatakan adanya beberapa tantangan yang dihadapi oleh madrasah baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dari segi internal, tantangan yang dihadapi adalah menyangkut:

- 1) Mutu; penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah umumnya belum dapat melahirkan lulusan yang berkualitas.
- 2) Pendidik; sebagian besar pendidik dan kependidikan di madrasah belum berkualifikasi sesuai tuntutan perundang-undangan.
- 3) Kurikulum; sebagian besar madrasah belum dapat mengimplementasikan standar isi dan belum sepenuhnya dapat mencapai standar kompetensi lulusan minimal. Persentase lulus Ujian Nasional cukup menggembirakan, kurang lebih 92% tetapi perolehan nilai rata-rata masih rendah.
- 4) Manajemen; penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah, yang 91,4% swasta (tahun 2006), umumnya belum dikelola dengan manajemen yang profesional.
- 5) Sarana prasarana; belum memadai sarana dan prasarana pada sebagian besar madrasah.

Status; belum sepenuhnya percaya diri dalam pengelolaan dan penyelenggaraan dan terbatasnya peluang penegerian sehingga madrasah negeri yang

umumnya telah memenuhi standar minimal, hanya berjumlah 8,6% (tahun2006).<sup>5</sup> Selain itu, menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar tantangan yang dihadapi dalam pendidikan adalah dari faktor guru, buku pelajaran, proses pendidikan, alat-alat pelajaran, manajemen sekolah, besarnya kelas sekolah, dan faktor keluarga, sedangkan menurut Nanang Fattah tantangan tersebut diantara lain:

- 1) Kemampuan keuangan yang tidak memadai;
- 2) Kepemimpinan kepala sekolah yang tidak kompeten;
- 3) Organisasi dan komitmen guru yang masih rendah;
- 4) Persepsi negatif dari masyarakat;
- 5) Penataan staf;
- 6) Konflik politik dan rasial;
- 7) Keterbatasan fasilitas;
- 8) Komunikasi yang tidak kondusif;
- 9) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah tidak jelas;
- 10) Rendahnya peningkatan mutu guru;
- 11) Sertifikasi kependidikan bagi guru, kepala sekolah dan pengawasa yang belum dipenuhi;
- 12) Peningkatan kesejahteraan guru yang belum memadai.<sup>6</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di ambil sebuah intisari, bahwa kelemahan pendidikan Islam sesungguhnya disebabkan oleh lemahnya pengelolaan manajemen di lembaga pendidikan terutama yang berbasis Islam, kemampuan sumber daya manusia (SDM) baik di tingkatan pendidik maupun tenaga kependidikan masih tergolong rendah, dan kualitas prestasi dan kurangnya animo dan support masyarakat yang masih juga rendah.

Hal inilah yang menimbulkan kesan bahwa para pengelola lembaga pendidikan Islam cenderung tidak memiliki sikap profesional sama sekali. Dari pola pandangan seperti inilah yang kemudian memunculkan sikap dualisme-dikotomik pendidikan. Dianggapnya masalah pendidikan bukan bagian dari masalah agama sehingga penanganannya belum di jalankan semaksimal mungkin selayaknya orang menjalankan agamanya. Gejala ini umumnya masih sangat melekat dikalangan umat Islam sehingga keberadaan lembaga pendidikan Islam menjadi tertinggal apalagi dukungan dari umat muslim juga masih terlihat kurang kuat.

### **Madrasah Menjadi Lembaga Pendidikan Islam Unggul di masa Neo Modern**

Kualitas kehidupan bangsa ditentukan oleh faktor pendidikan, maka upaya peningkatan mutu pendidikan mutlak diperlukan. Diharapkan dari ikhtiar tersebut harkat dan martabat bangsa dapat terangkat. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan penyempurnaan kurikulum yang berlaku sejak 2004. Tuntutan globalisasi mendorong dunia pendidikan untuk melakukan inovasi terus menerus dengan tetap menjamin fleksibilitas dalam implementasinya, sehingga kebutuhan lokalkondisi sekolah atau madrasah setempat dan karakteristik individu siswa dapat diserap aspirasinya dan ditampung dalam wadah pengembangan inovasi pendidikan.

---

<sup>5</sup> Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta; RajawaliPress, 2009, h. 23.

<sup>6</sup> Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, h. 30.

Kurikulum 2013 ingin memusatkan diri pada pengembangan seluruh kompetensi siswa. Bila selama ini siswa digiring untuk menghafal fakta-fakta, kini potensi dan kompetensi dikembangkan semaksimal mungkin. Dengan demikian, talenta peserta didik dapat berkembang melalui pengalaman belajar dengan pendekatan baru tersebut. Kompetensi siswa sulit berkembang bila dalam proses belajar mengajar siswa dalam strategi dengan model pembelajaran yang konvensional.<sup>7</sup>

Di Indonesia standar minimal sekolah dan Madrasah unggulan harus memenuhi:<sup>8</sup>

- 1) Iklim sekolah yang positif,
- 2) Proses perencanaan melibatkan seluruh warga sekolah dan madrasah,
- 3) Motivasi yang tinggi terhadap prestasi akademik,
- 4) Pemantauan yang efektif terhadap kemajuan murid,
- 5) Keefektifan guru,
- 6) Kepemimpinan instruksional yang berorientasi pada prestasi akademik,
- 7) Pelibatan orang tua yang aktif dalam kegiatan sekolah dan madrasah,
- 8) Kesempatan tanggung jawab dan partisipasi yang tinggi di sekolah dan madrasah,
- 9) Ganjaran dan insentif yang berdasarkan pada keberhasilan,
- 10) Tata tertib dan disiplin yang baik, dan
- 11) Pelaksanaan kurikulum yang jelas.

Untuk mewujudkan, mendirikan, dan menciptakan sekolah dan madrasah unggulan setidaknya ada 4 langkah sederhana, praktis, dan deskriptif, yaitu dengan memperbaiki manajemen. Untuk 3 bulan pertama memperbaiki banyak jenis manajemen yang meliputi:

1. Manajemen perencanaan. Dalam manajemen perencanaan ini terdapat:<sup>9</sup>
  - a) Analisis kebutuhan. Selama ini banyak sekolah dan madrasah yang belum menganalisa kebutuhan sebelum merencanakan dan melaksanakan programnya. Akibatnya, banyak program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya terkait dengan pendidikan sehingga program pendidikan tidak bisa memberikan dampak manfaat yang sangat signifikan. Dengan membahas topik ini, diharapkan pengelola lembaga sekolah dan madrasah agar dapat memahami perlunya menganalisa kebutuhan sebelum merencanakan dan melaksanakan program. Dengan demikian program dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar lembaga atau yang menjadi target lembaga.
  - b) Komunikasi dan informasi. Komunikasi yang efektif tidak mudah dilaksanakan. Banyak sekolah dan madrasah yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan program dan pencapaian tujuannya akibat gagal berkomunikasi secara internal dengan efektif. Keberadaan lembaga juga sering tidak disadari para stakeholder akibat kurangnya informasi dari lembaga kepada lingkungannya.
  - c) Pengarsipan dan tata buku. Banyak ditemukan di sekolah dan madrasah yang tidak melakukan dokumentasi dan pengumpulan dokumentasi (pengarsipan) yang baik tentang program dan kegiatan lembaga. Oleh karena itu, lembaga tidak memiliki data yang lengkap dan dapat membantu mereka melakukan perencanaan dan evaluasi program secara lebih baik.

---

<sup>7</sup> Mulyoto, *Strategi Pembelajaran di Era Kurikulum 2013*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2013, h. 118.

<sup>8</sup> Moedjiarto, *Sekolah Unggul*, Jakarta: Duta Graha Pustaka, 2002, h. 3.

<sup>9</sup> Muhammad Ilyasin dan Nanik Nurhayati, *Manajemen Pendidikan Islam*. Bukittinggi: Aditya Media Publishing 2012, h. 63.

- d) Pengelolaan sumber daya manusia. Ada sebagian besar sekolah dan madrasah masih mengalami kesulitan dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia dalam lembaganya. Kesulitan tersebut terlihat dari masih banyaknya sekolah dan madrasah yang belum memiliki struktur organisasi dan lebih banyak lagi yang belum memiliki uraian tugas untuk tiap jabatan yang ada dalam lembaganya. Padahal, pengelolaan sumber daya manusia sangat penting dalam menunjang pencapaian tujuan lembaga dan program-programnya.
  - e) Lingkungan kerja. Sekolah dan madrasah menganggap bahwa lingkungan kerja kondusif tidak penting, sehingga tidak memiliki fasilitas sendiri dan kondisi lingkungan kurang bersih. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja lembaga pada kenyataannya penataan tempat kerja dapat membawa gairah kerja yang besar. Untuk itu, lingkungan kerja perlu dikelola dengan baik. Dukungan fisik dan non fisik lingkungan kerja dapat membangun gairah kerja bagi peserta didik maupun tutor dan juga pengelola.
  - f) Monitoring dan evaluasi program. Diketahui bahwa masih banyak lembaga yang belum melakukan monitoring supervisi dan evaluasi secara teratur serta belum memanfaatkan hasil monitoring supervisi dan evaluasi sebagai masukan dalam memperbaiki pelaksanaan kegiatan lembaga.
2. Manajemen sumber daya manusia.

Sementara orang biasa berpikir runut dalam memecahkan masalah, hendaknya kita berani berpikir acak. Dalam bidang apapun orang sudah terbiasa melakukan sesuatu mengikuti cara pendahulunya, sehingga cara yang dipergunakan adalah cara biasa. Hanya orang-orang tertentu yang mampu melakukan cara baru di luar kebiasaan dan berhasil karena tekun dan gigih menemukan cara-cara baru tersebut. Kalau tidak, pasti mati layu sebelum berkembang. Banyak sekali penemuan didapatkan karena penerapan berpikir terbalik seperti telepon, listrik, komputer, sistem komputer, metode pemasaran, mesin-mesin dan sebagainya. Pada dasarnya manusia dilahirkan untuk malas, pasif, menunggu, manja, dan pesimis. Ada tiga hal yang dapat merubah sifat manusia, yakni melalui pendidikan, pengalaman, dan lingkungan. Karena pendidikan, pengalaman, dan lingkungan yang mengajarkan dan merubah manusia untuk menjadi rajin, aktif, kreatif, mandiri dan optimis. Ketiga hal tersebut dapat merubah pola pikir guru (karyawan) dari pola pikir kecil dan tercerai berai menjadi pola pikir yang besar dan menyatu.<sup>10</sup>

Dalam manajemen sumber daya manusia ini inovasi dijadikan sebagai jantung organisasi. Team work dalam manajemen sumber daya manusia ini didorong untuk selalu berinovasi tiada henti dalam meningkatkan kualitas prestasi dan memenangkan persaingan ketat. Oleh karena sebab itu, dalam manajemen sumber daya manusia, proses rekrutmen yang dilakukan harus transparan dan akuntabel. Dengan demikian, sumber daya manusia yang dihasilkan benar-benar profesional di bidangnya, sehingga kompetitif dan produktif karena menjadikan inovasi sebagai nafasnya. Sumber daya manusia adalah investasi paling mahal dalam organisasi. Manusia inilah energi dan sumber kemajuan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Baik uang, sarana prasarana, maupun jabatan. Manajemen sumber daya manusia seharusnya menjadi prioritas utama dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia ini meliputi

---

<sup>10</sup> Muhammad Ilyasin dan Nanik Nurhayati, *Manajemen Pendidikan Islam, ...*, h. 130.

penempatan personil dalam struktur, job description (pembagian tugas), jalur instruksi dan koordinasi, pola interaksi, serta komunikasi, mekanisme kenaikan karir, pengembangan kompetensi, dan lain-lain.<sup>11</sup>

### 3. Manajemen kurikulum.

Manajemen kurikulum sebenarnya menekankan pada strategi pengelolaan proses pembelajaran secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil pendidikan secara maksimal. Proses pembelajaran tampaknya memang menjadi penentu kualitas pendidikan melebihi komponen-komponen lainnya. Namun demikian, semua komponen tetap diperlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan.<sup>12</sup>

Manajemen kurikulum tentunya harus berpatokan pada komponen-komponen kurikulum: <sup>13</sup> a)Komponen Tujuan, Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, b) Komponen isi atau materi pelajaran, Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, c) Komponen metode atau strategi, Meliputi rencana metode dan perangkat yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, dan d) Komponen evaluasi, Untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu tes dan non-tes.

### 4. Manajemen kesiswaan.

Manajemen kesiswaan adalah pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari awal masuk (bahkan sebelum masuk) hingga akhir (tamat) dari lembaga pendidikan.

### 5. Manajemen keuangan.

Setidaknya ada 2 hal yang menyebabkan timbulnya perhatian yang besar pada keuangan. Yaitu pertama, keuangan termasuk kunci penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan. Kenyataan ini mengandung konsekuensi bahwa program-program pembaruan atau pengembangan pendidikan bisa gagal dan berantakan manakala tidak didukung oleh keuangan yang memadai. Kedua, lazimnya uang dalam jumlah besar sulit sekali didapatkan khususnya bagi lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri.<sup>14</sup>

### 6. Manajemen administrasi.

Ilmu administrasi sudah dijelaskan di muka merupakan ilmu yang baru di Indonesia. Perkembangan dari ilmu administrasi negara termasuk ilmu administrasi sekolah didorong oleh kebutuhan akan segera terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Seperti dimaklumi bersama bahwa penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang sedang membangun ini mengalami perkembangan yang cepat dan simultan, yang membutuhkan administrasi negara yang semakin baik. Perkembangan sekolah-sekolah termasuk madrasah-madrasah begitu pesat dan cepat baik dalam arti kuantitatif.

---

<sup>11</sup> Jamal Makmun Asmani, *Kiat Melahirkan Sekolah Unggulan*, Yogyakarta: Diva Press, 2013, h. 89.

<sup>12</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 161.

<sup>13</sup> Hamid Hamdani, *Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Pustaka Setia, 2012, h. 41.

<sup>14</sup> Mujamil Qamar, *Manajemen Pendidikan Islam, ...*, h. 163.

Perkembangan jumlah sekolah dan madrasah yang terus meningkat dengan cepat setiap tahun, walaupun tetap belum mampu menampung seluruh anak-anak Indonesia yang masih dalam usia sekolah. Kita catat perkembangan jumlah dari sekolah dan madrasah yang menjangkau ke pelosok pelosok desa. Perkembangan yang cepat sekali dari madrasah-madrasah negeri pada beberapa tahun yang lalu mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah. Tidak kalah cepatnya juga perkembangan jumlah madrasah-madrasah swasta. Perkembangan yang dengan pesat dan cepat dalam jumlah tersebut diatas serentak diimbangi pula dengan perkembangan dan perubahan yang cepat dan bervariasi yang menyangkut segi kualitatif yaitu materi dan metode pendidikan.

Perkembangan yang demikian kompleks dan simultan yang dialami oleh sekolah dan madrasah ini membutuhkan tata penyelenggaraan yang lebih baik, lebih rapi, agar tujuan dari sekolah dan madrasah itu dapat tercapai secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kelemahan-kelemahan yang biasanya dirasakan oleh sekolah dan madrasah di Indonesia ini adalah dalam bidang sarana dan prasarana. Kurangnya tenaga guru, baik dalam arti jumlah maupun mutunya, kurikulum dan sebagainya. Jarang sekali disebutkan bahwa kekurangan dari sekolah dan madrasah itu juga di dalam bidang administrasi. Keadaan dari sekolah dan madrasah yang lemah di dalam sarana dan prasarana, tenaga guru, dan kurikulum itu makin menjadi parah karena diselenggarakan dengan administrasi yang lemah pula.

### **Analisis Kritis Problematika Pendidikan**

Problematika pendidikan terutama di Indonesia sangatlah bermacam, berbagai kebijakan yang ada terlihat masih belum mampu mengurai simpul permasalahan pendidikan di tanah air. Terlebih model kebijakan yang diambil kurang aplikatif. Akibatnya, hal itu menyulitkan masyarakat untuk terlibat aktif dan mengambil peran penting dalam membangun sistem pendidikan nasional yang lebih komprehensif. Analisis penulis dalam hal ini setidaknya ada beberapa hal permasalahan yang sering terjadi di lembaga pendidikan.

#### **a. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana.**

Banyak sekali lembaga pendidikan Islam yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

Problem ini semakin hari semakin bertambah dengan kurangnya perhatian dari pemerintah, lembaga, maupun masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sebenarnya telah maksimal, mengingat pemerintah telah memberikan dana sebanyak 20% kepada lembaga. Akan tetapi lembaga belum mampu mengelola lembaganya dengan baik, sehingga dana yang diberikan oleh pemerintah belum mampu menjawab kekurangan yang ada di lembaga, khususnya pada sarana dan prasarana.

#### **b. Rendahnya kualitas guru.**

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya

sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Lebih lanjut penulis berasumsi bahwa marak oknum dalam pembelian sertifikasi menjadi hal yang lumrah didengar di Indonesia. Sehingga guru pada saat ini hanya mengejar sertifikasi dari pada fokus terhadap proses pembelajaran untuk mendidik siswanya semakin cerdas.

c. Rendahnya kesejahteraan guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, terang saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Ini merupakan sebuah potret yang sangat memprihatinkan, mengingat tugas guru adalah untuk mendidik, mengajar dan membimbing peserta didiknya untuk menjadi penerus bangsa. Akan tetapi guru masih harus disibukkan dengan kesejahteraan kehidupan mereka. Sehingga secara tidak langsung ini akan berdampak pada kualitas anak didik yang semakin hari semakin rendah dan tentunya akan berpengaruh terhadap moralitas anak bangsa di Indonesia.

d. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2017 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 2016 mencapai 93,02% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SMP/MTs masih yaitu 76,99%. Sedangkan di tingkat SMA 63,7%.<sup>15</sup> Penurunan Angka partisipasi murni tersebut perlu di cegah dengan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

Terutama di daerah-daerah tertentu yang sulit dijangkau oleh pemerintah, masih banyak sekali di Indonesia daerah-daerah yang masih menggunakan fasilitas apa adanya untuk proses belajar mengajar. Kita dapat saksikan entah melalui media sosial, media cetak ataupun disekeliling kita bahwa sangat banyak sekali peserta didik masih menggunakan pakaian yang tidak berseragam. Lebih parahnya lagi masih banyak juga di daerah-daerah tertentu dalam proses pembelajarannya di luar gedung. Hal tersebut juga di singgung Pakar pendidikan Universitas Paramadina Totok Amin Soefijanto yang menyebutkan akses siswa miskin terhadap pendidikan berkualitas masih kurang.<sup>16</sup>

Artinya mereka belum memiliki gedung sendiri untuk melakukan proses pembelajaran. Berbagai usaha telah pemerintah lakukan dalam pemerataan pendidikan, salah satunya desentralisasi yang mulanya adalah sentralisasi. Desentralisasi adalah kewenangan atau keputusan mulai diserahkan kepada daerah untuk mengelola lembaga pendidikan yang ada di daerahnya.

---

<sup>15</sup> Lihat [http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolahmadrasah?kode\\_wilayah=000000&tahun](http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolahmadrasah?kode_wilayah=000000&tahun), diakses pada 27 Juni 2022.

<sup>16</sup> Lihat <https://www.republika.co.id/berita/pjendidikan/eduaction/17/05/09/opoqav384-pondidikan-berkualitas-belum-merata>, diakses 27 Juni 2022.

e. Rendahnya relevansinya pendidikan dengan kebutuhan

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/So sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

Banyak sekali disimplin ilmu yang sebenarnya tidak lagi dibutuhkan dalam lembaga pendidikan, ini terkait dengan kurikulum yang diterapkan dalam lembaga pendidikan. Sebenarnya kurikulum yang ditetapkan seharusnya sesuai dengan kebutuhan kerja dilapangan.

f. Liberalisasi moral

Bentuk pelepasan tanggung jawab ini dapat dilihat dalam peraturan presiden Indonesia no 77 tahun 2007, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal atau biasa disebut BHP pendidikan (Badan Hukum Pendidikan). Dalam peraturan disebutkan bahwa pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan non-formal dapat dimasuki oleh modal asing dengan batasan kepemilikan modal maksimal 49 persen. Ini indikasi jelas bahwa telah terjadi komersialisasi pendidikan sebagai komunitas dagang atas nama liberalisasi.

Liberalisasi pendidikan tanpa melihat kondisi objektif masyarakat Indonesia yang sebgayaan besar masih miskin ini, justru menjerumuskan rakyat kepada kebodohan. Pendidikan tak ubahnya menjadi sarana mobilisasi dalam merebutkan kekayaan dan mempertahankan status quo bagi orang-orang yang kaya. Akibat liberalisasi pendidikan ini tentunya rakyat miskin tidak mampu membiayai pendidikan, sehingga dapat dikatan liberalisasi dan sahamisasi.

## KESIMPULAN

Tantangan yang hampir umum dihadapi oleh madrasah dalam usaha memajukan dan menjadi lembaga pendidikan yang unggul adalah kualitas *input* siswa, manajemen pengelolaan pendidikan di madrasah, perangkat sarana dan prasarana, kualitas sumber daya tenaga pendidik, dan lainnya. Apabila tantangan tersebut tidak diatasi maka akan menghambat proses kemajuan madrasah. Hal utama yang bisa dilakukan sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi madrasah adalah melakukan perbaikan di sistem manajemen, meliputi manajemen perencanaan, sumber daya manusia, kurikulum, kesiswaan, administrasi, dan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmani, Jamal Makmun, *Kiat Melahirkan Sekolah Unggulan*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Azra, Azyumardi, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Rekonstruksi dan Demokratisas)*, Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- Hamdani, Hamid, *Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Pustaka Setia, 2012.
- Ilyasin, Muhammad dan Nanik Nurhayati, *Manajemen Pendidikan Islam*. Bukittinggi ; Aditya Media Publishing 2012.
- Junaedi, Mansur Mahfud, *Rekontruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Moedjiarto, *Sekolah Unggul* ; Jakarta: Duta Graha Pustaka, 2002.
- Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*; Jakarta; RajawaliPress, 2009.
- Mulyoto, *Strategi Pembelajaran Di Era Kurikulum 2013* ; Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2013.
- Fatah, Nanang, *Analisis Kebijakan pendidikan* ; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Qomar, Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007.